

CASCADING  
SISTEM AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)  
**BADAN KEUANGAN DAERAH**  
**TAHUN 2018**



# PROSES BISNIS BADAN KEUANGAN DAERAH



# PROSES BISNIS FUNGSI PENGELOLAAN PAJAK



# Peraturan Walikota Batu Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Batu

### TUGAS POKOK

Mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan

### FUNGSI

- a. penyusunan kebijakan teknis keuangan daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis keuangan daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis keuangan daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang keuangan

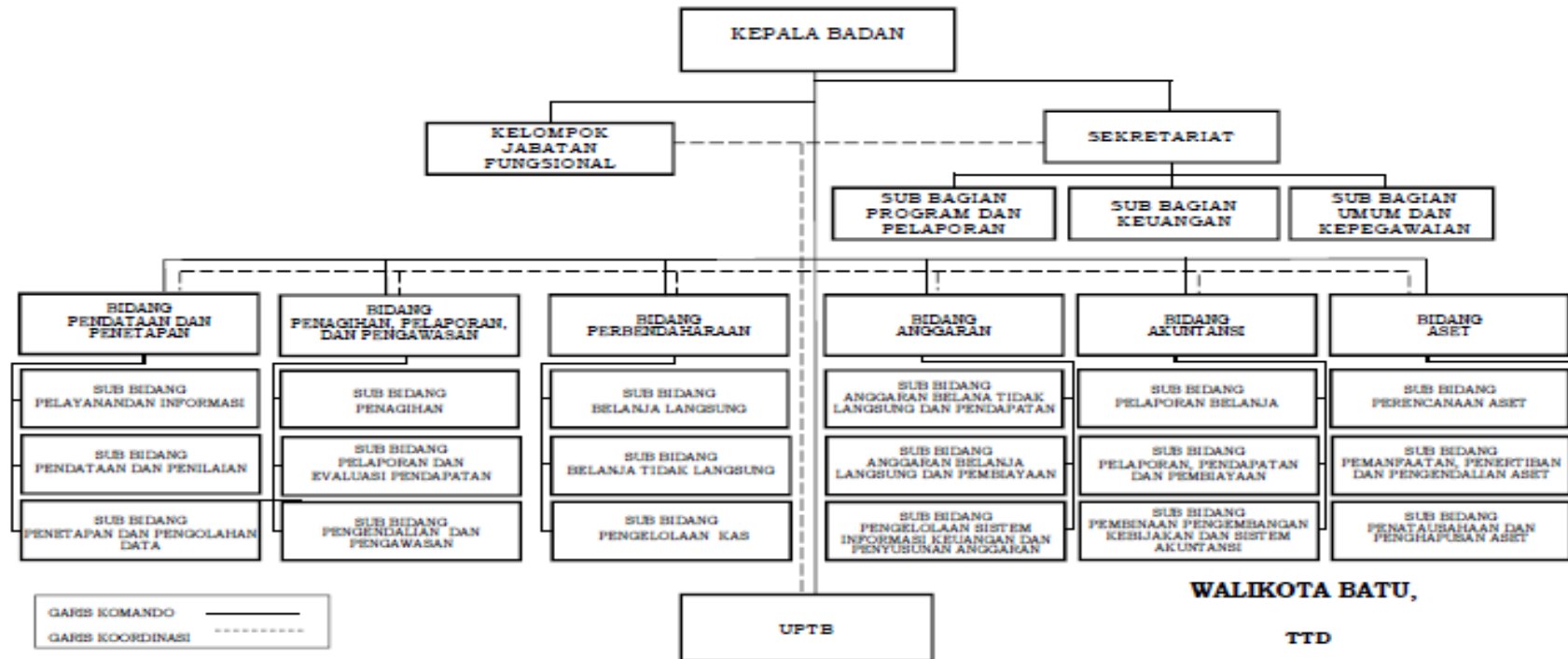
# BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAERAH

Lampiran Peraturan Walikota Batu

Nomor : 91 Tahun 2016

Tanggal : 20 Desember 2016

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BATU



WALIKOTA BATU,

TTD

EDDY RUMPOKO

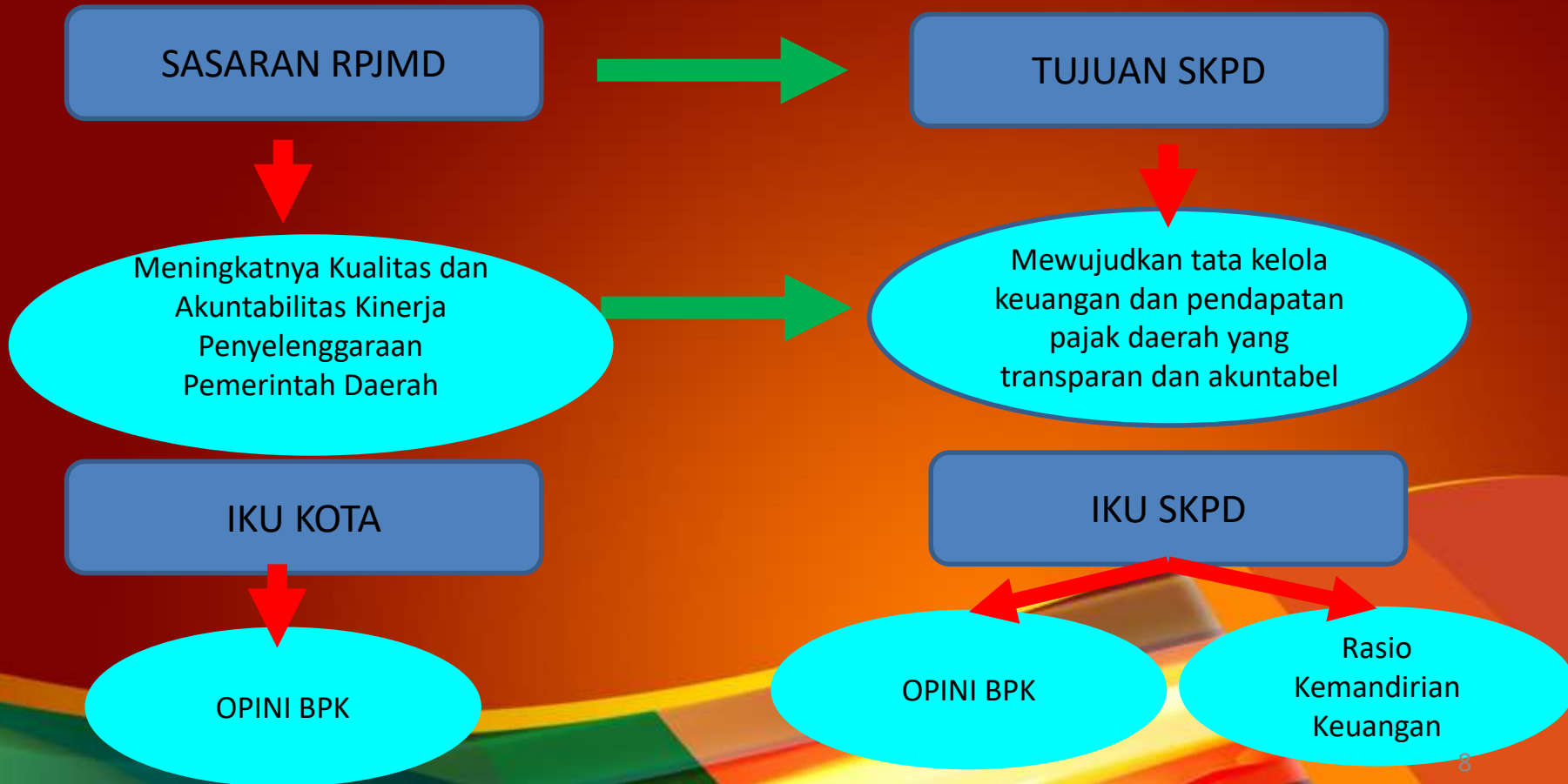
# PERBANDINGAN PROSES BISNIS DAN STRUKTUR ORGANISASI



# KETERKAITAN DENGAN RPJMD KOTA BATU TAHUN 2018 - 2022



# KESERASIAN RPJMD DAN RENSTRA SKPD





# RENSTRA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BATU 2018 - 2022



# CASCADING RENSTRA OPD 2018

Tujuan : Mewujudkan tata kelola keuangan dan pendapatan pajak daerah yang transparan dan akuntabel



# CASCADING RENSTRA OPD 2019

Tujuan : Mewujudkan tata kelola keuangan dan pendapatan pajak daerah yang transparan dan akuntabel

## RENCANA PERBAIKAN

### Sasaran 1

Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Keuangan Daerah

INDIKATOR :  
Persentase kepatuhan OPD dalam penyusunan Laporan Keuangan

### Program

- A. Program Pertanggungjawaban Keuangan Daerah  
(Bidang Akuntansi)
- B. Program Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
(Bidang Anggaran)
- C. Program Pengendalian Kas dan Penatausahaan Keuangan Daerah  
(Bidang Perbendaharaan)
- D. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah  
(Bidang Aset)

### Kegiatan

- A1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun SKPKD
- A2. Penyusunan dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan
- A3. Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD & Perwali Penjabaran Pertanggungjawaban APBD
- A4. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah
- B1. Penyusunan Raperda tentang APBD dan Penjabaran APBD
- B2. Penyusunan Raperda tentang p-APBD dan Penjabaran p-APBD
- B3. Fasilitasi Pengembangan dan Integrasi Teknologi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
- C1. Peningkatan Pelayanan dan Penatausahaan Perbendaharaan
- C2. Penataan Arsip Adm Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas
- C3. Penatausahaan keuangan PPKD
- C4. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah
- C5. Sosialisasi paket regulasi pengelolaan keuangan daerah
- C6. Peningkatan pelayanan gaji PNS
- D1. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
- D2. Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah
- D3. Manajemen Pengelolaan TP-TGR
- D4. Pemeliharaan Aset Milik Pemerintah Daerah
- D5. Penertiban dan Pengamanan Aset
- D6. Perencanaan dan Analisa Kebutuhan Barang Milik Daerah
- D7. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perencanaan

### Anggaran

Rp. 803.051.600,00

Rp. 2.167.732.000,00

Rp. 837.451.500,00,-

Rp. 2.522.003.970,00

# CASCADING RENSTRA OPD

Tujuan : Mewujudkan tata kelola keuangan dan pendapatan pajak daerah yang transparan dan akuntabel



Tujuan : Mewujudkan tata kelola keuangan dan pendapatan pajak daerah yang transparan dan akuntabel

## RENCANA PERBAIKAN



# INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

INDIKATOR  
TUJUAN

INDIKATOR  
SASARAN

INDIKATOR  
PROGRAM

INDIKATOR  
KEGIATAN

## Opini BPK

## Rasio Kemandirian Keuangan

Persentase kepatuhan  
OPD dalam  
penyusunan Laporan  
Keuangan

Prosentase  
peningkatan PAD dari  
sektor pajak

% SKPD yg  
menyusun  
laporan  
pendapatan  
& belanja  
dgn benar &  
sesuai SAP

**Penetapan  
APBD tepat  
waktu**

% SKPD  
dengan  
realisasi  
belanja  
diatas 80%

% SKPD yang  
menyusun  
neraca aset  
sesuai  
ketentuan

% data  
wajib pajak  
daerah yang  
tervalidasi

% realisasi  
penerimaan  
pajak  
daerah

1. Lap akhir tahun tepat waktu
2. Perda Perwali pertanggungjawaban
3. Sisdur akuntansi

1. Perda APBD
2. Perda P-APBD
3. Integrasi Siskeuda

1. Tertib adm belanja
2. Data gaji valid
3. Sosialisasi peraturan keuangan

1. Penyelesaian TP-TGR
2. Penyelesaian sengketa aset
3. KIB valid
4. Penyusunan RKBU
5. Integrasi SIMAKOBA

1. WP terverifikasi
2. NIOP yg terbayar
3. Cetak & Distribusi PBB
4. Penyuluhan WP
5. Peta potensi pajak

1. WP tertagih
2. Laporan penerimaan pajak yg valid
3. WP patuh bayar pajak

## INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD BADAN KEUANGAN DAERAH

- Nama OPD : Badan Keuangan Daerah Kota Batu
- Tugas : Mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan
- Fungsi :
- penyusunan kebijakan teknis keuangan daerah;
  - pelaksanaan tugas dukungan teknis keuangan daerah;
  - pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis keuangan daerah;
  - pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang keuangan
- Tujuan :
- Mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel
  - Meningkatkan kemandirian daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah
- INDIKATOR : 1. Persentase kepatuhan OPD dalam penyusunan Laporan Keuangan  
2. Rasio Kemandirian Daerah

ESELON II



# INDIKATOR KINERJA TUJUAN

NO.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	KONDISI AWAL (2017)	2018	2019	2020	2021	2022
1	Mewujudkan tata kelola keuangan dan pendapatan pajak daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase kepatuhan OPD dalam penyusunan Laporan Keuangan	OPD yang menyusun laporan keuangan dengan benar dan tepat waktu / jumlah OPD x 100%	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Rasio kemandirian	$\frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah APBD}} \times 100\%$	17,5%	17,5%	18%	18,5%	18,5%	19%

# INDIKATOR KINERJA SASARAN

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	KONDISI AWAL (2017)	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase kepatuhan OPD dalam penyusunan Laporan Keuangan	Persentase kepatuhan OPD dalam penyusunan Laporan Keuangan	OPD yang menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP/ Jumlah OPD x 100%	70%	80%	90%	95%	98%	98%
2	Meningkatnya realisasi penerimaan pajak daerah	Prosentase peningkatan PAD dari sektor pajak	Realisasi pajak Tahun n – Realisasi pajak Tahun (n-1) / Realisasi pajak tahun (n-1) x 100%	3,70%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU BADAN KEUANGAN DAERAH

Nama Bidang : Bidang Akuntansi

Tugas : merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengelolaan akuntansi pemerintah daerah dan laporan keuangan

Fungsi :

- a. penyusunan standar operasional prosedur bidang pengelolaan akuntansi pemerintah daerah dan laporan keuangan daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- c. penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD dan pelaporan kinerja keuangan daerah
- d. perumusan kebijakan pengendalian rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja;

SASARAN PROGRAM : Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan daerah

INDIKATOR :

- % OPD yang menyusun laporan keuangan tepat waktu dan sesuai prinsip kebijakan akuntansi

ESELON III

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU BADAN KEUANGAN DAERAH

Nama Bidang : Sub Bidang Pelaporan Belanja Bidang Akuntansi

Tugas Pokok :

- a. menyiapkan bahan kebijakan teknis bidang pelaporan belanja;
- b. menyiapkan bahan kebijakan pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan belanja SKPD;
- c. menyiapkan bahan koordinasi administrasi pelaporan belanja SKPD;

Kegiatan :

**Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun SKPKD**

INDIKATOR :

- Jumlah OPD yang menyusun laporan keuangan tepat waktu

ESELON IV



Kriteria  
Pemeriksaan

Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan

Kecukupan pengungkapan (adequate disclosure)

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

Efektivitas Sistem Pengendalian Intern

# KRITERIA WTP

Bukti pemeriksaan yang cukup memadai telah terkumpul dan pemeriksa telah melaksanakan penugasan sedemikian rupa sehingga mampu menyimpulkan bahwa ketiga standr pekerjaan lapangan telah terpenuhi

Semua aspek dari standar umum SPKN telah dipatuhi dalam penugasan pemeriksaan

Seluruh laporan keuangan (neraca, LRA, Laporan Arus Kas, CALK) telah lengkap disajikan

Laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Hal ini berarti bahwa pengungkapan informative yang cukup telah tercantum dalam CALK serta bagian-bagian lainnya dari laporan keuangan tersebut

Tidak terdapat situasi yang membuat pemeriksa merasa perlu untuk menambahkan sebuah paragraph penjelasan atau memodifikasi kalimat dalam laporan pemeriksaan.

# Rasio Kemandirian Daerah



$$\frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah APBD}} \times 100\%$$

## PAD

Pajak Daerah

9 jenis pajak daerah

BKD

Retribusi

3 jenis retribusi

10 OPD

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Bagi hasil penyertaan modal ke BUMD

BKD

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Jasa Giro, TGR, Pendapatan denda

BKD

**SEKIAN  
TERIMA KASIH**